

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta (BPS, 2006).

Indonesia termasuk di antara 189 negara yang pada tahun 2000 telah menandatangani deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang upaya, sasaran dan target-target pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yang terkenal dengan nama Milenium Development Goals (MDGs). Deklarasi itu pada intinya merupakan komitmen bersama untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara global, dengan sejumlah tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015. Mengacu pada hal tersebut, salah satu target yang mesti diupayakan Indonesia adalah menurunkan jumlah penduduk miskin hingga separuh dari jumlah pada tahun 1990 yang lalu. Misalnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, pemerintah menargetkan penurunan jumlah penduduk miskin dari sekitar 16,6 % dari total penduduk (atau sekitar 36 juta jiwa) pada tahun 2004 menjadi 8,2% (atau sekitar 18 juta jiwa) pada tahun 2009. Untuk mencapai target MDGs 2015, diperlukan strategi jitu pembangunan nasional agar penduduk miskin berkurang. Hal yang tidak mungkin bagi pemerintah mengentaskan kemiskinan bila tidak memberdayakan kemampuan penduduk miskin. Sehingga pemerintah mesti mendorongnya agar dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang mereka miliki. Korten (1980; 1984), mengatakan bahwa titik pusat arah pembangunan yang lebih *berpihak kepada rakyat*. Individu bukanlah sebagai objek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Kriteria yang dapat dijadikan pemberdayaan penduduk miskin adalah sektor UMKM.

UMKM merupakan salah satu katup penyelamat dalam proses pemulihan kondisi ekonomi saat bangsa Indonesia mengalami krisis. Bila dilihat berdasarkan skalanya, sumbangan pertumbuhan PDB UMKM lebih tinggi dibandingkan sumbangan pertumbuhan Usaha Besar. Pada tahun 2004 dari 4,86 persen pertumbuhan PDB nasional secara total, meningkat menjadi 2,85 persen berasal dari pertumbuhan UMKM. Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2004 adalah sebesar 43,22 juta naik 1,61 persen terhadap tahun sebelumnya (BPS, 2005). Berdasarkan data tersebut, sektor UMKM memiliki potensi yang dapat dijadikan pilar percepatan pengentasan kemiskinan.

Akan tetapi, kenyataannya sebagian besar UMKM masih bersifat usaha semi-formal, yang mana aturan atau pendekatan kepada Perusahaan Swasta belum bisa diterapkan sepenuhnya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik yang secara langsung terlibat atau yang tidak terlibat langsung punya peran besar dalam pemberdayaan UMKM melalui pengorganisasian dan pendampingan (manajemen, peningkatan kualitas, pemasaran) advokasi, penyadaran akan hak, dan kontrol atas kebijakan Pemerintah (Daerah) yang merugikan UMKM.

Survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2004), yang diperkuat pula dengan temuan berbagai survey lainnya menunjukkan bahwa masalah paling penting yang dihadapi UMKM adalah pemasaran produk. Selain pemasaran, permasalahan UMKM adalah manajemen, peningkatan kualitas, akses teknologi, serta akses modal. Untuk mendapatkan pembiayaan formal/informal, maka terdapat kriteria yang menjadi syarat utama untuk dipenuhi, seperti perkembangan usaha, kelayakan usaha, cakupan pasar. Sedangkan untuk memenuhi kriteria tersebut tergantung pada manajemen serta kualitas SDM yang dimiliki UMKM. Kriteria inilah yang menjadi dasar untuk perkembangan UMKM secara mandiri. Maka diperlukan kelembagaan yang dapat menjadi konsultan bagi UMKM, yang merekomendasikan kepada perbankan dalam mendapatkan kredit usaha. Pemerintah telah memiliki kelembagaan konsultan seperti Lembaga Penyuluh Bisnis (LPB), Konsultan Keuangan Mitra Bank

(KKMB), *Business Development Service* (BDS). Selain untuk mengimbangi perkembangan sektor UMKM yang terus meningkat, juga untuk terus mengoptimalkan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. LPB dan KKMB merupakan lembaga pendamping yang dibentuk pemerintah untuk membimbing pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Tapi Lembaga pendamping tersebut masih memiliki kendala serta belum optimal pelaksanaannya. Hal ini disebabkan terutama kualitas konsultannya, masih belum jelasnya fungsi lembaga pendamping.

Sebagai langkah solutif serta sistematis maka lembaga pendamping yang ada mesti lebih terintegrasi. Hal ini dipandang perlu agar lebih mengoptimalkan fungsinya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan UMKM. Sehingga pelaksanaannya diperlukan peran serta dari berbagai sektor kemasyarakatan, seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, apakah peran lembaga pendamping sudah optimal dalam menjembatani pencapaian solusi perkembangan UMKM. Kedua, apakah dengan pengoptimalan UMKM dapat menurunkan tingkat kemiskinan sehingga target MDGs 2015 dapat tercapai. Ketiga, bagaimana rumusan rekomendasi tentang pengoptimalan fungsi lembaga pendamping.

### **Tujuan**

1. Memberikan rumusan rekomendasi yang tepat terhadap pengoptimalan peran lembaga pendamping dalam mengembangkan UMKM
2. Memberikan gagasan pemberdayaan sektor UMKM yang dapat menjadi motor penggerak pengurangan kemiskinan sebagai strategi pencapaian target MDGs 2015

## TINJAUAN PUSTAKA

Mengutip sumber dari Wikipedia, kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Menurut Susanto (2006), seseorang dikatakan miskin salah satunya jika mereka memiliki keterbatasan atas berbagai akses, mempunyai pendapatan atau pengeluaran yang subsisten, sering secara terpaksa terlibat dalam utang piutang atau menjual barang yang dimiliki ketika harus memenuhi kebutuhan yang sangat subsisten dan keadaan yang darurat.

*Millenium Development Goals* (MDGs) adalah kesepakatan di antara negara-negara untuk menyusun target penyelesaian masalah kemiskinan secara global dalam memasuki millennium ke tiga. Pertemuan sekitar 150 pimpinan Negara-negara di dunia ini menghasilkan kesepakatan yang terdiri atas 8 sasaran (*goals*), 18 target dan 48 indikator yang harus dicapai pada tahun 2015 nanti.

### **Pengertian UMKM**

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam pasal 6, disebutkan kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pengertian umum kelembagaan adalah suatu bentuk organisasi yang memiliki peran dan fungsi tertentu dan berada dalam suatu struktur organisasi yang lebih luas. Kelembagaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yakni :

- Lembaga pemerintah (eksekutif-legislatif-yudikatif)
- Lembaga publik (sektor publik)
- Lembaga swasta (sektor privat)

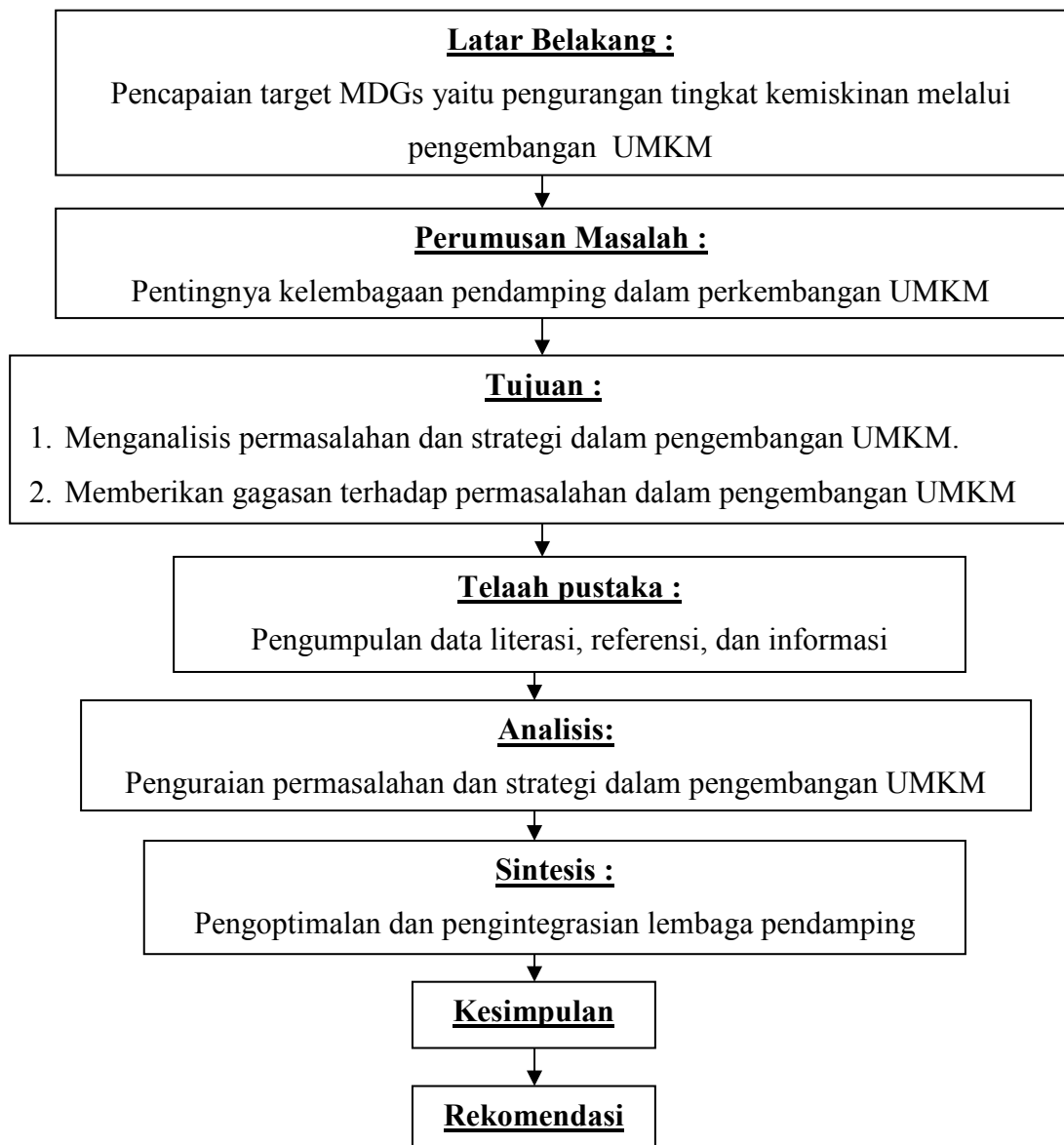
### **Pengertian Pendampingan**

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perikehidupan mereka sendiri. Pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.

## METODE PENULISAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka seperti literatur, bacaan terkait, dan data dari media elektronik. Sementara pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Data berupa informasi-informasi yang terkumpul dikaitkan dengan fakta-fakta dan teori-teori yang ada dan selanjutnya dianalisis serta disintesis.

Penulisan dilakukan dengan kerangka pemikiran berikut :



## ANALISIS-SINTESIS

### Analisis

#### 1. Keterkaitan UMKM Dalam Pengentasan Kemiskinan Dalam Pencapaian Target Program MDGs 2015

Menurut Margureit Robinson (2000), Masyarakat miskin memiliki perbedaan klasifikasi, pertama, masyarakat sangat miskin, mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Kedua, masyarakat miskin yang memiliki kegiatan ekonomi. Ketiga, masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan memiliki kegiatan produktif.

Ketiga kategori tersebut memiliki program pengentasan yang berbeda-beda agar sasaran pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Bagi kelompok pertama program secara langsung lebih tepat diterapkan, seperti bantuan pangan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif diterapkan pendekatan tidak langsung, misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro, mensinergikan UMKM dengan usaha menengah dan besar.

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha Tahun 2005 - 2006**

NO	SKALA USAHA	JUMLAH (Orang)		PERKEMBANGAN	
		TAHUN 2005 *)	TAHUN 2006 **)	JUMLAH	%
1	Usaha Kecil (UK)	78.994.872	80.933.384	1.938.512	2,45
2	Usaha Menengah (UM)	4.238.921	4.483.109	244.188	5,76
	Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	83.233.793	85.416.493	2.182.700	2,62
3	Usaha Besar (UB)	3.212.033	3.388.462	176.429	5,49
	<b>JUMLAH</b>	<b>86.445.826</b>	<b>88.804.955</b>	<b>2.359.129</b>	<b>2,73</b>

Keterangan :

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Perkembangan sektor UMKM dalam penyerapan tenaga kerja skalanya sangat besar dibandingkan dengan sektor usaha besar. Hal ini menyiratkan bahwa bila ingin ada suatu akselerasi penurunan tingkat kemiskinan maka fokus strategi pemerintah tertuju pada pengembangan sektor UMKM. Dengan demikian, orang miskin memiliki kegiatan produktif yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Permasalahan selanjutnya adalah apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikut data mengenai produktifitas sektor UMKM dan Usaha Besar. Tingkat produktifitas (rupiah/TK) dapat mengukur kemampuan penghasilan tiap tenaga kerja.

**Table 2. Unit Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja dan Produktifitas, Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2003&2004**

Skala Usaha	Jumlah Usaha (juta unit)		Tenaga Kerja (juta orang)		Produktifitas (Rupiah/TK)	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Usaha Kecil	42,48	47,22	71,09	70,92	10,37 juta	11,57 juta
Usaha Menengah	0,05	0,06	8,30	8,15	33,7 juta	38,71 juta
Usaha Besar	2,17	2,25	0,42	0,40	1,87 miliar	2,22 miliar

*Sumber: Perkembangan Indikator Makro UMKM tahun 2005, Berita Statistik Maret 2005 Badan Pusat Statistik dan Kementrian Koperasi & Usaha Kecil Menengah*

Perkembangan kontribusi UMKM serta peningkatan tenaga kerja pada sektor UMKM menggambarkan produktifitas UMKM. Tabel diatas menggambarkan walaupun jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM lebih tinggi dibandingkan sektor Usaha Besar, produktifitas tiap tenaga kerja jauh berbeda dengan sektor Usaha Besar. Secara berturut-turut produktifitas Usaha Kecil, Menengah, dan Besar pada tahun 2003, 10,37 juta, 33,7 juta dan 1,87 miliar rupiah. Pada tahun 2004 produktifitas masing-masing sektor mengalami peningkatan 11,57 juta, 38,71 juta, 2,22 miliar rupiah/TK. Data tersebut (tabel 3) menyiratkan bahwa masyarakat banyak menggantungkan hidupnya pada sektor Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, sektor

UMKM menjadi penyeimbang dalam mengerakkan sektor perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja.

Terdapat hubungan *linear* antara pemberdayaan UMKM dan target pencapaian MDGs dalam pengurangan kemiskinan. Masyarakat miskin dapat memiliki kegiatan yang produktif walaupun penghasilan yang didapat masih rendah. Hal inilah yang mesti menjadi perhatian pemerintah untuk lebih memberdayakan sektor UMKM agar dapat meningkatkan skala usaha melalui pendampingan seperti membuka pasar pada produk yang dihasilkannya, serta adanya akses pembiayaan yang lebih fleksibel terhadap sektor UMKM. Melalui pemberdayaan UMKM maka terdapat suatu transfer informasi serta kemampuan dalam mengembangkan usahanya. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah UMKM secara nasional ada 42,4 juta dengan memberikan sumbangan terhadap PDB mencapai Rp 1.013,5 trilyun (56,7%) dari total PDB) dan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 79 juta jiwa (BDS LPPM UNS, 2005).

## **2. Lembaga Pendamping Sebagai Salah Satu Motor Penggerak UMKM**

### **2.1 Permasalahan Lembaga Pendamping**

Tuntutan peningkatan peran aktif masyarakat (swasta) dalam penguatan UMKM merupakan konsekuensi logis, seiring *reorientasi* kebijakan pascakrisis ekonomi yang melahirkan pendekatan pembangunan sentralistik ke desentralisasi. Keberadaan lembaga jasa pendamping usaha kecil bukan hal baru. Hanya saja sebelumnya lebih banyak dilakukan pemerintah. Peran swasta memang sudah muncul tapi masih sebatas konsultan perusahaan besar. Sehingga seiring dengan berkembangnya sektor UMKM maka diperlukan lembaga pendamping yang akan menjadi akselarator pengembangan dan pemberdayaan UMKM

Salah satu penyebab kondisi pendamping usaha yang tak berkembang ini, karena pemerintah daerah kurang memberi perhatian. Banyak pimpinan di daerah belum mengetahui fungsi lembaga pendamping ini. Selain itu diakui, tenaga ahli dan

kompetensi penyedia jasa pengembangan bisnis ini perlu dibenahi serta masih belum jelasnya fungsi lembaga pendamping. Oleh karena itu, Pemberdayaan UMKM mesti melibatkan berbagai sektor sehingga dalam pelaksanaan program kerja, pemerintah, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi, serta Media tidak berjalan sendiri-sendiri.

## **SINTESIS**

### **1. Keunggulan UMKM**

Data BPS 2005 menyiratkan betapa besar potensi yang diberikan sektor UMKM terhadap PDB, walaupun hambatan dalam pengembangannya cukup besar, seperti kurangnya akses teknologi, akses modal, akses pasar. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan dukungannya melalui pemberian stimulus sektor UMKM yang tidak hanya terpusat pada daerah perkotaan tetapi juga daerah pedesaan. Sehingga secara tidak langsung bila terdapat stimulus pada sektor ini, perekonomian di pedesaan akan berkembang. Faktor eksternal perekonomian saat ini, yaitu terjadinya krisis global menyebabkan banyak terjadi kasus PHK. Akibatnya orang yang di-PHK akan kembali ke desa dan menjadi pengangguran. Dampak ini dapat diminimalisir dengan pemberian stimulus yang kuat terhadap UMKM, agar penduduk miskin tetap memiliki pekerjaan yang produktif.

Sejarah membuktikan bahwa sektor UMKM menyelamatkan perekonomian bangsa saat krisis ekonomi. Sektor ini tidak tersentuh dengan gejolak ekonomi dunia. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah UMKM secara nasional ada 42,4 juta dengan memberikan sumbangan terhadap PDB mencapai Rp 1.013,5 trilyun (56,7% dari total PDB) dan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 79 juta jiwa (BDS LPPM UNS, 2005).

Banyak penduduk miskin yang menggantungkan hidupnya pada sektor UMKM. Jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja

Indonesia (BPS, 2008). Artinya, bila sektor ini tidak berkembang, pemerintah menggantungkan kesejahteraan 91,8 juta jiwa.

## **2. Pengoptimalan Fungsi Lembaga Pendamping Menjadi Fungsi Terintegrasi**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku usaha yang dominan di Indonesia. Maka dari itu tidak berlebihan jika perhatian diarahkan pada UMKM. Dalam hal ini peran lembaga pendamping sangat diperlukan, dimana berfungsi untuk memberikan pelatihan dalam meningkatkan profesionalitas pengusaha UMKM, diantaranya dengan memberikan pengarahan membuat rencana bisnis yang baik, memiliki legalitas yang baik dan membuat proposal yang layak dapat dioptimalkan, sehingga dengan pelatihan itu diharapkan bank akan lebih mudah memberikan pinjaman.

Telah disebutkan bahwa hambatan terbesar lembaga pendamping adalah fungsi lembaganya yang kurang terintegrasi cenderung berjalan sendiri-sendiri. Sehingga agar optimal lembaga pendamping mesti terdiri dari beberapa konsultan dari berbagai instansi terkait dengan UMKM (Perguruan tinggi, Media, LSM, Pemda, serta Asosiasi). Lembaga pendamping berasal dari:

### **a) Asosiasi**

Usaha besar adalah “Lokomotif” yang akan menarik “gerbong-gerbong” kegiatan ekonomi (supplier) menengah dan kecil. UMKM hanya menerima saja tentang harga, kualitas, kuantitas dari Usaha Besar. Artinya daya tawar UMKM rendah. Sehingga diperlukan Asosiasi yang menjadi penyeimbang Usaha Besar. Sehingga dengan adanya konsultan dari Asosiasi, akses informasi UMKM dapat teratasi karena bagian dari lembaga pendampingnya adalah pihak Asosiasi.

### **b) Lembaga Pendidikan & Penelitian**

Lembaga ini menentukan peningkatkan kualitas produk, kemampuan manajemen, pemasaran, pengelolaan keuangan para pelaku ekonomi. Melalui

peran kelembagaan pendidikan, maka akses terhadap teknologi dapat terbuka, berupa konsultasi mengenai manajemen operasional, keuangan, targetting pasar. Dalam hal pengkreditan, Perguruan Tinggi pun dapat menjadi lembaga yang merekomendasikan UMKM kepada perbankan. Untuk memecahkan masalah persyaratan perbankan yang terlalu kaku, yang sulit dipenuhi UMKM.

**c) Lembaga Swadaya Masyarakat**

Sebagian besar UMKM masih bersifat usaha semi-formal, yang mana aturan atau pendekatan kepada Perusahaan Swasta belum bisa diterapkan sepenuhnya, maka peran LSM sangat penting, baik yang secara langsung terlibat (BDS, KKMB) atau yang tidak terlibat langsung. Pemberdayaan UMKM bisa melalui pengorganisasian dan pendampingan (manajemen, peningkatan kualitas, pemasaran), advokasi, penyadaran akan hak, dan kontrol atas kebijakan Pemerintah (Daerah) yang merugikan UMKM.

**d) Media**

Pengoptimalan peran Media seperti mempromosikan *produk klaster* ke skala nasional, internasional, menjawab kebutuhan para UMKM akan info pasar, produk pesaing, bahan baku, dan harga. Selain itu, juga melancarkan arus pertukaran informasi antar UMKM dan pendukungnya (perguruan tinggi, lembaga penelitian, keuangan).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Target MDGs 2015 dapat tercapai, bila pemerintah dapat menciptakan suatu kemandirian ekonomi di kalangan penduduk miskin. Sektor UMKM dapat menjadi akselarator dalam pengurangan tingkat penduduk miskin, hal itu terbukti dengan data BPS 2005 yang menyiratkan bahwa banyak penduduk miskin yang menggantungkan hidupnya di sektor ini, dan pada tahun 2003 memberikan pada PDB lebih dari 56%, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 79 juta jiwa.

Semua pihak wajib berperan dalam mengembangkan sektor ini, dengan terus mengurangi hambatan dalam perkembangan UMKM melalui optimalisasi lembaga pendamping UMKM. Hambatan pengoptimalisasi lembaga ini terletak pada kurangnya peran serta dari sektor di luar pemerintah. Sehingga pemerintah harus mendorong tiap lembaga untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan sektor UMKM.

### **Saran**

1. Sebaiknya Stimulus lebih banyak pada sector riil (UMKM) sehingga pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tingkat kemiskinan dapat dikurangi.
2. Strategi jitu dalam mencapai MDGs 2015 adalah pemberdayaan, sehingga pemerintah perlu untuk merevitalisasi peran lembaga pendamping.
3. Adanya aturan yang jelas dan fungsi lembaga pendamping dari pemerintah.
4. Pengoptimalan fungsi lembaga pendamping UMKM yang terintegrasi dari semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Susanto, Hari.2006.*Dinamika Penanggulangan Kemiskinan*.Jakarta:Khanata
- [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id) [diakses tanggal 28 Maret pukul 20.00]
- [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) [diakses tanggal 29 Maret pukul 19.30]
- [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) [diakses tanggal 28 Maret pukul 20.30]
- [www.sentraukm.com](http://www.sentraukm.com) [diakses tanggal 30 Maret pukul 20.00]
- [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com) [diakses tanggal 1 April 2009 pukul 16.00]
- [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id) [diakses tanggal 1 April 2009 pukul 16.15]
- [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) [diakses tanggal 29 Maret pukul 19.00]

## Daftar Riwayat Hidup

Ketua Pelaksana

Nama : Achmad F. Romadhona

NIM : H34063135

Fakultas/Dept/Semester : Ekonomi dan Manajemen/Agribisnis/6

Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 21 April 1988

Alamat Asal : Jl. Lingkar Selatan Komplek Bumi Mukti Indah Blok  
A4 No.3 Serang, Banten

Alamat Bogor : Asrama Mahasiswa Banten, BBS  
IPB Darmaga, Bogor, Jawa Barat

No. Handphone : 0856 915 22 731

E-mail : firdiansyah\_roma@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Muhammadiyah Serang
2. SDN VII Serang
3. SLTPN 1 Serang
4. SMAN 1 Serang
5. Institut Pertanian Bogor

### Pengalaman Organisasi :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Wakil Ketua Rohis SMAN 1 Serang                      | 2003-2004     |
| 2. Ketua Organisasi Masyarakat Banten- IPB              | 2007-2009     |
| 3. Staf Departemen Komunikasi dan Informasi BEM FEM IPB | 2007-2008     |
| 4. Pengurus KOPMA IPB                                   | 2007-Sekarang |

Prestasi :

- ## 1. Finalis Lomba LKTM Ketahanan Pangan UNDIP 2008

### Anggota

Nama : Manzili Awal  
 NIM : H34063415  
 Fakultas/Dept/Semester : Ekonomi dan Manajemen/Agribisnis/6  
 Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Nyiur, 12 Desember 1988  
 Alamat Asal : Balai Lamo, Lubuk Nyiur, Kecamatan Batang Kapas,  
 Pesisir Selatan, Sumatera Barat  
 Alamat Bogor : Badoneng, Dramaga, Bogor, Jawa Barat  
 No. Handphone : 085213988306  
 E-mail : manziliawal@gmail.com

### Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Simabur
2. SLTP Negeri 1 Pariangan
3. SMA Negeri 2 Bekasi
4. Institut Pertanian Bogor

### Pengalaman Organisasi :

1. Staf Departemen Exchange Program IAAS Indonesia LC IPB 2007-2009
2. Staf Departemen PSDM HIPMA IPB 2007-2008
3. Ketua FKMPS Bogor 2008-2009

### Prestasi :

1. Medali Perunggu Voli Putra SPORTAKULER FEM IPB Tahun 2008

### Anggota

Nama : Azizah Purwitasari  
 NIM : H34070032  
 Fakultas/Dept/Semester : Ekonomi dan Manajemen/Agribisnis/5  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Mei 1990  
 Alamat Asal : Jalan Attahiriyah II No.61 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan  
 Alamat Bogor : Babakan Raya, Dramaga, Bogor, Jawa Barat  
 No. Handphone : 02519382239  
 E-mail : klosezzy@yahoo.com

### Riwayat Pendidikan :

1. TK REstu Ibu SLTP Negeri 1 Pariangan
2. SDN Pejaten Barat 09 Pagi
3. SDN Pejaten Barat 11 Pagi
4. SMPN 227 Jakarta
5. SMAN 55 Jakarta
6. Institut Pertanian Bogor

### Pengalaman Organisasi :

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Pramuka SDN Pejaten Barat 11 Pagi | 2000-2001 |
| 2. PMR SMPN 227 Jakarta              | 2001      |
| 3. OSIS SMPN 227 Jakarta             | 2001      |
| 4. MADING SMAN 55 Jakarta            | 2004-2007 |
| 5. HIPMA IPB                         | 2008/2009 |

### Prestasi :

1. Lulus USMI IPB 2007
2. Juara I Lomba Desain Kelas SMA N 55 Jakarta